**Matriks Target Capaian**

**Usulan Rencana Aksi Nasional**

**Open Government Indonesia 2023-2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Judul Komitmen** | Pengurangan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi UU TPKS  *(Usul judul dari OGI: Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam UU TPKS)* |
| **Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab** | 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban |
| **Kementerian/Lembaga Terkait** |  |
| **Bappenas** | * + - 1. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga       2. Direktorat Hukum dan Regulasi |
| **CSO Mitra** | 1. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 2. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) |

| **Penanggung Jawab** | **Ukuran Keberhasilan** | **Target Capaian** | | | | **Data Dukung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B06 (2023)** | **B12 (2023)** | **B18 (2024)** | **B24 (2024)** |
| Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) | Tersedianya peraturan teknis terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS | Terlaksananya penyusunan draf peraturan teknis terkait UPTD PPA yang melibatkan masyarakat sipil | Tersedianya peraturan teknis terkait UPTD PPA yang telah disusun dengan kolaborasi bersama masyarakat sipil |  |  |  |
| Terlaksananya sosialisasi terkait implementasi UU TPKS | - | Terlaksananya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran publik terkait implementasi UU TPKS | Terlaksananya evaluasi hasil pelaksanaan sosialisasi | - |  |
| Terlaksananya perbaikan tata kelola UPTD PPA serta perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA  (*usul dari OGI: bisa digabung ke UK 1, jika memang penyusunan dan sosialisasi standar untuk tata kelola UPTD PPA menjadi follow up peraturan turunan)* | *-* | - | Terlaksananya perbaikan tata kelola UPTD PPA sesuai peraturan teknis dan masukan masyarakat luas | Terlaksananya sosialisasi sistem dan mekanisme kepada pemerintah daerah dan jaringan masyarakat sipil level regional dan lokal | Adanya desain awal untuk standar penerapan UPTD PPA di daerah dan lokal |
| Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) | Tersedianya peraturan teknis terkait Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS | 1. Terlaksananya kepesertaan LPSK sebagai lembaga pengusul dan pengampu dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan PP DBK  2. Terlaksananya konsultasi publik pembahasan RPP Dana Bantuan Korban | 1. Terlaksananya kepesertaan LPSK sebagai lembaga pengusul dan pengampu dalam pembahasan RPP DBK pada tahap Harmonisasi.  2. Terlaksananya koordinasi K/L dalam proses pemberian persetujuan RPP DBK | 1. Terlaksananya sosialisasi PP Dana Bantuan Korban  2. Tersusunnya Draf Peraturan Teknis terkait Dana Bantuan Korban sebagai turunan dari RPP DBK | 1. Terlaksananya sosialisasi PP Dana Bantuan Korban  2. Tersedianya Peraturan Teknis terkait Dana Bantuan Korban sebagai turunan dari RPP DBK |  |
| Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Tersedianya peraturan teknis terkait Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS | 1. Tercantumnya usulan draf dalam kerangka regulasi perencanaan  2. Tersusunnya konsepsi draf yang telah teruji kelayakan konsepsi draf | Terselenggaranya sosialisasi draf dalam rangka pelibatan publik secara luas | Tersusunnya draf hasil PAK dan selesainya proses harmonisasi terhadap draf | Penyampaian draf kepada Presiden untuk ditetapkan dan pengundangan dalam lembaran Negara |  |
| INFID | Tersedianya kajian dari masyarakat sipil untuk mendukung penyusunan draf peraturan teknis terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) | Terlaksananya pengumpulan data persepsi warga dan operasionalisasi UU TPKS | Tersedianya kajian mengenai implementasi UU TPKS, khususnya terkait UPTD PPA untuk mendukung penyusunan draf peraturan teknis mengenai UPTD PPA | - | - |  |
| Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam melakukan sosialisasi implementasi UU TPKS | - | - | Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai implementasi UU TPKS | Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam evaluasi hasil sosialisasi |  |
| Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses perbaikan tata kelola UPTD PPA serta perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA | - | Tersedianya kajian terkait UPTD PPA, termasuk untuk masukan proses perbaikan tata kelola UPTD PPA | Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemberian masukan terhadap proses perbaikan tata kelola UPTD PPA | Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam evaluasi proses perbaikan tata kelola UPTD PPA |  |
| IJRS | Tersedianya kajian dari masyarakat sipil untuk mendukung penyusunan draf peraturan teknis terkait Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS | Terlaksananya penyusunan kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan teknis terkait DBK  Terlibatnya masyarakat sipil dalam konsultasi publik pembahasan RPP Dana Bantuan Korban | Tersedianya kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan teknis terkait DBK  Terlibatnya masyarakat sipil dalam sosialisasi draf dalam rangka pelibatan publik secara luas | Terlibatnya masyarakat sipil dalam sosialisasi PP terkait DBK | Terlibatnya masyarakat sipil dalam sosialisasi PP terkait DBK |  |